



Peran Pemerintah dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Eskalasi Kerugian Ekonomi Akibat Banjir di Sumatra

Ahmad Wahyudi Zein

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Demala Sari

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Aprilia Regitasya Parinduri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Ika Wahyu Indriani Ningsih

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Al Habib Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Alamat: Jl. IAIN No. 1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis: saridemala@gmail.com

Abstrak. *Flooding remains one of the most recurrent hydrometeorological disasters in Sumatra and has generated substantial economic and social consequences for regional development and community welfare. One of the dominant factors intensifying flood occurrences is the uncontrolled conversion of land use, particularly the transformation of forest areas, wetlands, and water catchment zones into settlements, large-scale plantations, and economic infrastructure. This study aims to examine the government's role in regulating land-use change and its implications for the escalation of economic losses caused by flooding in Sumatra, viewed from the perspective of Islamic macroeconomics. The research employs a descriptive qualitative approach by utilizing secondary data obtained from official reports published by the National Disaster Management Agency (BNPB), the Central Statistics Agency (BPS), and the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), as well as relevant academic literature. The findings indicate that poorly regulated land-use change has significantly contributed to the increasing frequency and severity of flooding, leading to infrastructure damage, reduced agricultural productivity, disruption of economic activities, and rising fiscal pressure on local governments. Weak institutional supervision, inconsistency in spatial planning policies, and ineffective law enforcement have limited the government's ability to mitigate these impacts. From the perspective of Islamic macroeconomics, these conditions contradict the principles of trust (amanah), public interest (maslahah), and the objectives of Islamic law (maqashid al-shariah), particularly in safeguarding wealth and human life. Therefore, strengthening governmental control over land-use change through policies grounded in justice, environmental sustainability, and public welfare is essential to reduce flood risks and minimize economic losses in Sumatra.*

Keywords: *economic losses; flooding; government intervention; Islamic macroeconomics; land-use change.*

Abstrak. Banjir merupakan permasalahan lingkungan yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sumatra. Peningkatan kejadian banjir tidak dapat dilepaskan dari perubahan penggunaan lahan yang berlangsung secara masif, khususnya konversi kawasan hutan, daerah aliran sungai, dan lahan resapan air menjadi kawasan permukiman, perkebunan, serta infrastruktur ekonomi. Perubahan tersebut telah menurunkan daya dukung lingkungan dan meningkatkan risiko terjadinya bencana hidrometeorologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengendalikan alih fungsi lahan serta implikasinya terhadap peningkatan kerugian ekonomi akibat banjir di Sumatra dengan menggunakan perspektif ekonomi makro Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laporan resmi instansi pemerintah, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan kebijakan tata ruang, inkonsistensi pemberian izin penggunaan lahan, dan kurang optimalnya penegakan hukum berkontribusi terhadap meningkatnya frekuensi banjir dan besarnya kerugian ekonomi yang ditanggung masyarakat dan pemerintah daerah. Kerugian tersebut meliputi kerusakan infrastruktur, penurunan produktivitas sektor pertanian, serta terganggunya aktivitas ekonomi regional. Dalam perspektif ekonomi makro Islam, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip amanah dan kemaslahatan dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, penguatan peran pemerintah melalui kebijakan pengendalian alih fungsi lahan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat menjadi langkah strategis untuk menekan risiko banjir dan meminimalkan kerugian ekonomi di wilayah Sumatra.

Kata kunci: *alih fungsi lahan; banjir; ekonomi makro Islam; kerugian ekonomi; peran pemerintah.*

PENDAHULUAN

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatra, dengan kecenderungan dampak yang semakin meluas dari tahun ke tahun. Kejadian banjir tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak langsung terhadap stabilitas sosial dan perekonomian daerah. Dari perspektif ekonomi makro, bencana banjir dapat mengganggu aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi, serta meningkatkan beban fiskal pemerintah daerah akibat kebutuhan pembiayaan penanggulangan dan pemulihan pascabencana. Kondisi ini menjadikan banjir sebagai persoalan struktural yang perlu ditangani secara komprehensif, bukan semata-mata sebagai peristiwa alam yang bersifat insidental.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap meningkatnya intensitas dan frekuensi banjir di wilayah Sumatra adalah perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali. Alih fungsi kawasan hutan, daerah aliran sungai, serta lahan resapan air menjadi kawasan permukiman, perkebunan skala besar, dan infrastruktur ekonomi telah menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan. Ketika kemampuan tanah untuk menyerap air berkurang, limpasan air permukaan meningkat dan memperbesar risiko terjadinya genangan serta banjir di wilayah hilir. Fenomena ini menunjukkan adanya hubungan erat antara aktivitas ekonomi, degradasi lingkungan, dan meningkatnya risiko bencana.

Banjir yang terjadi secara berulang dapat menurunkan produktivitas sektor pertanian, merusak infrastruktur publik, serta menghambat mobilitas barang dan jasa. Dampak tersebut berpotensi menekan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan meningkatkan kerentanan ekonomi rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor-sektor rentan terhadap bencana. Dengan demikian, banjir tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga tantangan serius bagi pembangunan ekonomi daerah.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilepaskan dari prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan umum. Manusia dipandang sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah terjadinya kerusakan (fasad). Alih fungsi lahan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan

lingkungan bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, karena menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat luas. Kerugian ekonomi akibat banjir, seperti rusaknya harta benda dan terganggunya mata pencaharian, menunjukkan belum optimalnya upaya menjaga tujuan maqashid syariah, khususnya dalam melindungi harta dan jiwa.

Dalam kerangka ekonomi makro, kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan menciptakan dampak lanjutan yang bersifat sistemik. Banjir yang terjadi secara berulang dapat menurunkan produktivitas sektor pertanian, merusak infrastruktur publik, serta menghambat mobilitas barang dan jasa. Dampak tersebut berpotensi menekan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan meningkatkan kerentanan ekonomi rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor-sektor rentan terhadap bencana. Dengan demikian, banjir tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga tantangan serius bagi pembangunan ekonomi daerah.

KAJIAN TEORITIS

1. **Konsep Alih Fungsi Lahan dalam Perspektif Ekonomi Lingkungan**
Alih fungsi lahan dapat dipahami sebagai perubahan pemanfaatan lahan dari fungsi ekologis menuju fungsi ekonomi, seperti konversi kawasan hutan, lahan basah, atau daerah resapan air menjadi kawasan permukiman, industri, dan perkebunan. Dalam kajian ekonomi lingkungan, perubahan penggunaan lahan yang tidak dikelola secara terkendali berpotensi menimbulkan dampak eksternal negatif, yaitu biaya sosial yang tidak diperhitungkan dalam aktivitas ekonomi. Hilangnya vegetasi dan berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap air menyebabkan meningkatnya limpasan permukaan, yang pada akhirnya memperbesar risiko terjadinya banjir. Dari sudut pandang ekonomi makro, degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena meningkatnya biaya sosial, kerusakan infrastruktur, dan menurunnya kualitas sumber daya alam.
2. **Banjir dan Dampaknya terhadap Perekonomian Daerah**
Banjir tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga memicu gangguan ekonomi yang bersifat berantai dan memengaruhi stabilitas pembangunan daerah. Dampak langsung terlihat pada kerusakan infrastruktur publik, permukiman, dan lahan pertanian, sementara dampak tidak langsung muncul dalam bentuk terganggunya proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam kerangka ekonomi makro, kejadian banjir dapat menurunkan kinerja ekonomi daerah melalui penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), meningkatnya tingkat pengangguran, serta bertambahnya beban pengeluaran pemerintah untuk penanganan dan pemulihan pascabencana. Apabila banjir terjadi secara berulang dan tidak diimbangi dengan kebijakan mitigasi yang efektif, kerugian ekonomi yang ditimbulkan akan semakin besar dan bersifat kumulatif.
3. **Kerugian Ekonomi dan Tujuan Pembangunan dalam Ekonomi Islam**
Kerugian ekonomi yang timbul akibat banjir, seperti hilangnya sumber pendapatan masyarakat, menurunnya hasil pertanian, serta rusaknya fasilitas umum, menunjukkan adanya kegagalan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkeadilan. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan ekonomi seharusnya diarahkan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya bagi masyarakat. Kerugian ekonomi yang dialami akibat bencana mencerminkan belum tercapainya tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan jiwa (hifz al-nafs). Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mengelola perubahan penggunaan lahan menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

4. Peran Pemerintah dan Konsep Hisbah dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, pemerintah atau ulil amri memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan umum dan mencegah terjadinya kerusakan sosial maupun lingkungan. Konsep hisbah menegaskan fungsi pengawasan pemerintah terhadap aktivitas ekonomi agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan prinsip amanah dan keadilan, mengingat sumber daya alam dipandang sebagai titipan yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Alih fungsi lahan yang mengabaikan dampak lingkungan bertentangan dengan prinsip syariah karena berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.

5. Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kegagalan Pasar Lingkungan

Dalam teori ekonomi publik, pemerintah berperan sebagai pengatur untuk mengoreksi kegagalan pasar, termasuk kegagalan yang muncul akibat dampak eksternal lingkungan. Aktivitas ekonomi yang mendorong alih fungsi lahan sering kali hanya mempertimbangkan keuntungan jangka pendek, tanpa memperhitungkan biaya sosial berupa kerusakan lingkungan dan meningkatnya risiko bencana. Pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan tata ruang, mengendalikan perizinan penggunaan lahan, serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Ketidaktegasan pemerintah dalam menjalankan fungsi tersebut dapat memperburuk degradasi lingkungan dan meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana banjir. Oleh karena itu, efektivitas peran pemerintah menjadi faktor kunci dalam mengurangi dampak negatif perubahan penggunaan lahan terhadap perekonomian daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam peran pemerintah dalam mengendalikan alih fungsi lahan serta kaitannya dengan meningkatnya kerugian ekonomi akibat banjir di wilayah Sumatra. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial, ekonomi, dan lingkungan secara komprehensif melalui analisis makna, kebijakan, dan konteks yang melatarbelakanginya. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan perspektif ekonomi makro dengan nilai-nilai ekonomi Islam guna memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai dampak kebijakan publik terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan publikasi ilmiah. Data tersebut meliputi laporan dan statistik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan jurnal ilmiah, buku referensi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik alih fungsi lahan, banjir, dan kerugian ekonomi dalam kerangka ekonomi makro Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah, mencermati, dan membandingkan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan kebijakan tata ruang, pengelolaan lingkungan, serta dampak ekonomi akibat bencana banjir. Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menginterpretasikan temuan-temuan penelitian dan mengaitkannya dengan konsep-konsep utama dalam ekonomi makro Islam, seperti amanah, masalah, keadilan, dan maqashid syariah.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada wilayah Sumatra dengan fokus kajian pada peran pemerintah dalam kebijakan pengendalian penggunaan lahan dan dampaknya terhadap

perekonomian daerah. Dampak ekonomi yang dianalisis meliputi kerusakan infrastruktur, penurunan produktivitas sektor pertanian, terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, serta meningkatnya beban fiskal pemerintah daerah akibat penanggulangan dan pemulihan bencana. Pembatasan ini bertujuan agar analisis yang dilakukan tetap terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap data sekunder yang bersumber dari laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta berbagai penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa wilayah Sumatra memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana banjir. Dalam beberapa tahun terakhir, banjir tidak hanya terjadi dengan frekuensi yang lebih sering, tetapi juga menimbulkan dampak yang semakin luas, baik dari segi cakupan wilayah terdampak maupun besarnya kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir di Sumatra telah berkembang menjadi permasalahan struktural yang berkaitan erat dengan pola pengelolaan lingkungan dan kebijakan pembangunan.

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah adanya keterkaitan yang kuat antara alih fungsi lahan dan meningkatnya risiko banjir. Perubahan penggunaan lahan di wilayah Sumatra banyak terjadi pada kawasan hutan, lahan gambut, serta daerah aliran sungai (DAS) yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tata air. Konversi kawasan tersebut menjadi perkebunan skala besar, permukiman, dan infrastruktur ekonomi menyebabkan menurunnya kemampuan lahan dalam menyerap air hujan. Akibatnya, volume limpasan air permukaan meningkat dan memperbesar potensi terjadinya genangan serta banjir, terutama di wilayah hilir. Fenomena ini memperkuat pandangan dalam ekonomi lingkungan bahwa aktivitas ekonomi yang tidak dikendalikan dapat menimbulkan eksternalitas negatif yang merugikan masyarakat secara luas.

Dari perspektif ekonomi makro, banjir yang terjadi secara berulang di Sumatra memberikan tekanan yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Kerusakan infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, sistem irigasi, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan, menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Gangguan terhadap infrastruktur tersebut berdampak langsung pada menurunnya produktivitas dan efisiensi kegiatan ekonomi. Selain itu, sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah juga mengalami dampak serius berupa gagal panen dan penurunan hasil produksi akibat lahan yang terendam banjir. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya pendapatan petani dan meningkatnya kerentanan ekonomi rumah tangga.

Kerugian ekonomi akibat banjir tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga menimbulkan dampak tidak langsung dan jangka panjang. Terhambatnya proses produksi dan distribusi barang serta jasa menyebabkan terganggunya rantai pasok, meningkatnya biaya logistik, dan melemahnya daya beli masyarakat. Dalam skala makro, kondisi tersebut berpotensi menurunkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah menghadapi peningkatan beban fiskal karena harus mengalokasikan anggaran yang besar untuk penanggulangan bencana, perbaikan infrastruktur, serta pemberian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dan mitigasi banjir yang diterapkan oleh pemerintah belum sepenuhnya berjalan efektif. Meskipun secara normatif pemerintah telah memiliki berbagai regulasi terkait tata ruang,

perlindungan lingkungan, dan pengelolaan DAS, implementasi kebijakan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan koordinasi antarinstansi, inkonsistensi dalam pemberian izin penggunaan lahan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang menjadi faktor utama yang mempercepat degradasi lingkungan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan praktik yang dijalankan.

Dalam kerangka teori ekonomi publik, situasi tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsi korektif terhadap kegagalan pasar yang disebabkan oleh eksternalitas lingkungan. Aktivitas ekonomi yang mendorong alih fungsi lahan cenderung berorientasi pada keuntungan jangka pendek, sementara biaya sosial berupa kerusakan lingkungan dan meningkatnya risiko bencana ditanggung oleh masyarakat secara kolektif. Ketidaktegasan pemerintah dalam mengendalikan aktivitas tersebut memperlebar ketimpangan antara kepentingan ekonomi sesaat dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Jika ditinjau dari perspektif ekonomi makro Islam, hasil penelitian ini menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam. Dalam Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan (fasad). Alih fungsi lahan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan bertentangan dengan prinsip amanah, karena sumber daya alam dipandang sebagai titipan yang harus dikelola untuk kepentingan bersama. Kerugian ekonomi akibat banjir yang dialami masyarakat juga mencerminkan belum tercapainya tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan jiwa (hifz al-nafs).

Konsep hisbah dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas ekonomi agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, penguatan peran pemerintah dalam mengendalikan perubahan penggunaan lahan menjadi langkah strategis untuk mengurangi risiko banjir dan menekan kerugian ekonomi. Kebijakan tata ruang yang berlandaskan pada prinsip keadilan, keberlanjutan lingkungan, dan kemaslahatan umum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian bencana, tetapi juga sebagai fondasi bagi stabilitas ekonomi daerah dalam jangka panjang.

Dalam ekonomi Islam, pemerintah atau pemimpin (ulil amri) bertugas untuk menjaga kebaikan bersama (masalah 'ammah) dan mencegah timbulnya kerusakan (mafsadah). Konsep hisbah menekankan peran pemerintah dalam mengawasi kegiatan ekonomi agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Pengelolaan lahan harus dilakukan dengan prinsip amanah dan keadilan, karena sumber daya alam adalah titipan dari Allah yang harus dikelola secara berkelanjutan. Perubahan fungsi lahan yang tidak memperhatikan dampak lingkungannya bertentangan dengan prinsip syariah, karena dapat menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara luas.

Rangkaian bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera telah menimbulkan kerugian besar, baik materiil maupun korban jiwa. Fenomena ini, yang kian sering terjadi dan intensitasnya meningkat, disinyalir kuat sebagai dampak dari praktik "korupsi alam" yang masif. Menyikapi situasi darurat ini, Masyarakat secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan cepat dan konkret. Mereka menekankan bahwa penanganan bencana tidak hanya sebatas mitigasi pasca-kejadian, melainkan harus menyentuh akar permasalahan yang merusak ekosistem. Seruan ini menggarisbawahi urgensi penegakan hukum demi keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian alih fungsi lahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan ekonomi makro. Sinergi antara

kebijakan publik yang tegas, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta penerapan nilai-nilai ekonomi Islam menjadi prasyarat penting dalam upaya mengurangi dampak banjir dan kerugian ekonomi di wilayah Sumatra.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa banjir di wilayah Sumatra merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional dan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam. Aktivitas manusia, khususnya perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali, memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan intensitas dan frekuensi kejadian banjir. Konversi kawasan hutan, daerah resapan air, dan wilayah aliran sungai menjadi kawasan permukiman, perkebunan, serta infrastruktur ekonomi telah menurunkan kemampuan lingkungan dalam mengatur tata air secara alami, sehingga meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana.

Alih fungsi lahan yang tidak dikelola secara berkelanjutan berdampak luas terhadap perekonomian daerah. Banjir menyebabkan kerusakan infrastruktur publik, menurunnya produktivitas sektor pertanian, terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, serta meningkatnya beban fiskal pemerintah daerah akibat kebutuhan pembiayaan penanggulangan dan pemulihan bencana. Dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa banjir tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi serius terhadap stabilitas ekonomi makro dan kesejahteraan masyarakat di Sumatra.

Peran pemerintah dalam mengendalikan perubahan penggunaan lahan memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya mengurangi risiko banjir dan menekan kerugian ekonomi. Meskipun pemerintah telah memiliki berbagai regulasi terkait tata ruang dan perlindungan lingkungan, implementasi kebijakan tersebut masih belum optimal. Lemahnya pengawasan, inkonsistensi dalam pemberian izin penggunaan lahan, serta kurang tegasnya penegakan hukum menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan fungsi pemerintah sebagai pengatur dan pengawas aktivitas ekonomi yang berdampak pada lingkungan.

Dalam perspektif ekonomi makro Islam, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya peran pemerintah sebagai *ulil amri* dalam menjaga kemaslahatan umum. Alih fungsi lahan yang mengabaikan dampak lingkungan bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan maslahah, serta tidak sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga harta dan jiwa. Kerugian ekonomi akibat banjir yang ditanggung oleh masyarakat merupakan bentuk mafsadah yang seharusnya dapat dicegah melalui kebijakan publik yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial.

Dengan demikian, pengendalian alih fungsi lahan merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Penguatan peran pemerintah melalui penegakan hukum yang konsisten, pengawasan yang efektif, serta pengintegrasian prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan menjadi langkah strategis untuk mengurangi risiko banjir dan meminimalkan kerugian ekonomi. Upaya ini diharapkan mampu mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di wilayah Sumatra.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2022). *Data dan informasi bencana Indonesia*. BNPB.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2023). *Laporan kejadian banjir di*

Indonesia. BNPB.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik lingkungan hidup Indonesia*. BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Sumatra*. BPS.

Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.

Fauzi, A. (2014). *Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan: Teori dan aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2021). *Status lingkungan hidup Indonesia*. KLHK.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2022). *Laporan deforestasi Indonesia*. KLHK.

Mankiw, N. G. (2016). *Macroeconomics* (9th ed.). Worth Publishers.

Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Salemba Empat.

Sadeq, A. M. (1996). *Economic development in Islam*. International Islamic Publishing House.

Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi: Teori pengantar*. RajaGrafindo Persada.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic development* (11th ed.). Pearson Education.

World Bank. (2021). *Disaster risk management in Indonesia*. World Bank Publications.

Yusuf, M., & Wiroso. (2017). *Bisnis syariah*. Gramedia.